

MERANCANG SEJARAH GEREJA YANG SOLIDER

Rafael Isharianto

STFT Widya Sasana, Malang

Abstract:

The effect of the Dutch colonialism in Indonesia can still be observed in the historiography on the Indonesian Churches. It is partly due to the fact that the colonialism was closely related to christian missions. After the proclamation of the Indonesian Independence, the progress of the Indonesian nationalism has influenced the way of the historians to chart the history of Indonesian, as well as that of the Catholic Church, in the light of this conception. In this article, we will reflect on the meaning of the historical truth by taking into consideration some ideas in the political theology in so far as these can be observed in the reflections of J.B. Metz. And in so doing, we intend to learn how to prevent ourselves from proclaiming that we have the historical truth.

Keywords: sejarah, Gereja, kolonialisme, penderitaan, nasionalisme, mémoire, solidaritas.

Kedatangan Gereja-gereja kristen, termasuk Gereja Katolik, di Indonesia, sebagaimana terekam dalam historiografi misi, bersinggungan dengan fakta kolonialisme yang dilakukan oleh kekuasaan Barat Kristen. Dalam arti tertentu, realitas kolonialisme historis ini dapat menjadi sebuah cacat yang bisa mengungkit luka dan pengalaman buruk bagi Gereja-gereja di Indonesia. Trauma yang dipicu oleh kolonialisme historis ini belum sepenuhnya lenyap dari bawah sadar bangsa Indonesia.

Kelihatan bahwa warisan historis ini menjadi suatu beban yang ditanggung oleh orang kristen Indonesia dewasa ini. Bagi kita kaum Kristiani, fakta bahwa, dalam suatu periode tertentu dalam sejarah Gereja Indonesia, dominasi bangsa Belanda di Indonesia dan sejarah misi pernah begitu bersinggungan merupakan pengalaman yang tidak membanggakan. Namun, kita tidak bisa menyangkalnya. Untuk bisa melihat dan menerima « kebenaran » berkenaan dengan realitas historis tersebut, maka, dalam refleksi ini, kita akan mencoba menjawab persoalan historiograf seputar penulisan sejarah Gereja Indonesia dalam visi nasionalis yang tetap terbuka terhadap warisan historis di atas tanpa kompleks rasa bersalah. Hal ini berarti kita mau berusaha menilai ‘kebenaran sejarah’ tentang Gereja dalam masa kolonialisme dengan kritis, tanpa jatuh dalam tendensi anakronik.

Dengan demikian, renungan kita ini bertujuan membangun suatu sikap solider dengan para pelaku sejarah sebagai pewaris sejarah Gereja kita saat ini. Kita hendak

belajar solider dengan mereka semua yang sudah mati, sebab para pewaris tersebut biasanya merupakan pribadi-pribadi yang dengan amat mudah bisa kita adili berdasarkan tendensi ideologis tertentu. Pendek kata, kita mau belajar solider dengan para protagonis yang telah berkiprah dalam sejarah misi, dengan segala keunggulan dan keterbatasan mereka. Maka, sangat pentinglah untuk dicatat bahwa sejauh diresapi oleh sikap solider secara historis ini, segala upaya untuk melihat kebenaran historis mendapatkan jaminannya. Selain itu, tujuan lain refleksi historis-teologis ini adalah untuk membantu kita melihat dan memahami Gereja pribumi yang mewarisi sejarah penginjilan yang terajut dengan fakta kolonialisasi.

1. Kebenaran historis dan nasionalisme Gereja Indonesia

Kalau orang bertanya tentang hakikat ‘kebenaran historis’, kita harus menjawab bahwa ‘kebenaran historis’ sebetulnya tidak ada jika ‘kebenaran’ dimengerti sebagai ‘kebenaran material’. Fakta sejarah, sebagaimana ditandakan Seignobos, merupakan materi yang dibayangkan, bukan sebagaimana ditangkap oleh pengamatan inderawi.¹ Yang ada hanyalah operasi mental dalam kepala sejarawan untuk menjelaskan suatu fakta di masa lampau. Oleh karena itu, sejarah bersifat subyektif. Dengan demikian, sangat sia-sia bagi sejarawan untuk berpretensi obyektif, netral dan tidak memihak.

Demikian pula halnya dengan historiografi Gereja Indonesia. Penulisan sejarah Gereja Indonesia, meski didorong untuk mewariskan apa yang benar, juga tidak luput dari tendensi subyektif ini. Namun sekurang-kurangnya, kita bisa berpandangan positif bahwa para sejarawan tersebut mencoba menyodorkan apa yang mungkin (*probable*) benar menurutnya.

Pada bagian ini kita akan secara khusus mencoba mendalami persoalan seputar penulisan sejarah Gereja Indonesia. Yang menjadi fokus bagian ini adalah sosok Gereja sebagaimana ditampilkan dalam model penulisan sejarah yang bercorak pandang nasionalis. Tetapi sebelumnya perlu kita sepakati bahwa nasionalisme dalam renungan kita ini mengacu kepada ideologi yang mengidentikkan negara atau bangsa dengan rakyat sedemikian rupa, sehingga kesetiaan setiap individu mengatasi kepentingan individu dan kelompok.

Sejarah dan Ingatan. Kita berhadapan dengan penggunaan kata “ingatan” atau “kenangan”; kedua kata benda ini merupakan penjabaran dari kata *mémoire*.

1 « Alors se pose la question préalable à toute étude historique. Comment peut-on connaître un fait réel qui n'existe plus ? Est historique tout fait qu'on ne peut plus observer directement parce qu'il a cessé d'exister. Il n'y a pas de caractère historique inhérent aux faits, il n'y a historique que la façon de les connaître. L'histoire n'est pas une science, elle n'est qu'une procédé de connaissance. [...] Toute connaissance historique étant indirecte, l'histoire est essentiellement une science de raisonnement. Sa méthode est une méthode *indirecte*, par raisonnement. » Dikutip oleh Antoine Prost, *Douze leçons sur l'histoire*, Paris : Éditions du Seuil, « Points-Histoire », 1996, p. 69.

Kata kerja “mengingat” dalam perspektif historis tidaklah sekedar menunjuk kepada aktivitas menyimpan/merekam berbagai informasi atau pada fungsi otak dengan maksud memperoleh, menyimpan dan mengenali kembali informasi historis yang sudah direkam. Lebih dari itu semua, “ingatan” berarti juga warisan mental, keseluruhan kenang-kenangan yang menjiwai segala representasi ingatan tersebut, yang memberi inspirasi bagi seluruh perilaku individu-individu, serta yang menjamin kohesi individu-individu tersebut dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini, kita bisa berpaling kepada Herodotus yang telah berupaya menyimpan “ingatan” akan fakta historis dan sepak terjang orang-orang Yunani. Oleh karena itu, baginya, sejarah memiliki fungsi sosial, yakni menciptakan kelangsungan antargenerasi sambil tetap memungkinkan suatu keterbukaan untuk memahami masa sekarang.

Adapun interaksi antara sejarah dan ingatan terstruktur menurut dua prinsip dasar. Yang pertama adalah pengumpulan ingatan. Di sini, ingatan para pelaku dan saksi sejarah suatu peristiwa historis menjadi salah satu sumber bagi para sejarawan. Yang kedua berkenaan dengan penyusunan ingatan historis. Para sejarawan tidak lagi puas dengan hanya menggunakan ingatan kolektif sebagai sumber riset. Mereka berusaha menyusun kembali ingatan tersebut.

Sejarah Indonesia dalam perspektif nasionalis. Kebangkitan bangsa-bangsa Asia-Afrika telah memacu kelahiran nasionalisme di Indonesia. Pengaruhnya terasa juga dalam penulisan sejarah Indonesia. Untuk menggantikan paham kolonial yang mendominasi penulisan sejarah Indonesia sampai kemerdekaan Indonesia dimunculkanlah visi nasionalis. Dengan demikian, visi nasionalis merupakan terjemahan dari leburnya sejarah dalam « ingatan » nasional. Menurut visi ini, sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 3 babak: sebelum, selama dan sesudah kolonisasi Belanda.² Sebagai suatu penulisan yang menekankan pentingnya bangsa-negara (*nation-state*) sebagai unsur kohesi fundamental dalam pembentukan identitas Indonesia, visi nasionalis mengidentikkan negara atau bangsa dengan rakyat Indonesia, sekurang-kurangnya menurut prinsip-prinsip etnologis dan kultural.

Karena munculnya merupakan reaksi atas kolonialisme yang memecah belah kesatuan dan persatuan nusantara, visi nasionalis bermaksud membangun kembali gambaran utuh tentang Indonesia. Perhatian visi ini dicurahkan kepada kesatuan teritorial, bahkan kesatuan dan hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa sekitarnya,³ administratif maupun moral. Kembali ke persoalan pembabakan waktu, periode sejarah Indonesia dimulai dengan kejayaan kerajaan Hindu-Jawa (kerajaan Majapahit pada abad XIV-XV), disusul dengan masa kolonialisme dan periode Republik.

2 Pandangan Denys Lombard yang dikutip Moh. Ali Fadillah, « Etnisitas dan Nasionalisme Indonesia: Perspektif Arkeologi » dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.), *Panggung Sejarah. Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, p. 121.

3 Noel Teodoro, “Persatuan Nusantara: Renungan tentang Kawasan Melayu-Indonesia dan Filipina Sebagai Lapangan Penelitian Sejarah” dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.), *Op. Cit.*, p. 151.

Gereja Katolik di Indonesia dalam visi nasionalis. Bagaimanakah figur Gereja di Indonesia dalam perspektif historis nasionalis? Jelaslah bahwa tema nasionalisme terasa mendominasi. Mengenai masa kolonialisme, dimensi nasional dan religius kebudayaan Indonesia ditampilkan sebagai dua unsur yang bercampur. Islam sebagai agama dominan menjadi suatu identitas politis yang ditempatkan berhadapan dengan kekuatan Eropa Kristen. Gereja diidentifikasi secara eksklusif dengan para pendatang Eropa (Belanda). Hal ini menjadi lebih signifikan bila kita melihat adanya campur tangan kuasa politis dalam kebijakan internal Gereja menyangkut penyebaran agama Kristen di Indonesia dalam periode tersebut. Aktivitas misi di daerah jajahan merupakan aktivitas orang Belanda bagi orang-orang seiman di kalangan penduduk Eropa. Kecuali di Flores dan Timor, karya pendidikan dan kesehatan semula diarahkan hanya bagi para imigran Eropa.

Karena kegiatan-kegiatan tersebut mengarahkan sasarannya pada orang Eropa di wilayah jajahan, penguasa politis merasa berkewajiban mengatur. Alasan untuk mengatur kegiatan misioner di daerah jajahan ini antara lain juga dilandasi kepentingan komersial. Seperti dapat kita mengerti, kompeni sangat mementingkan masalah perdagangan. Atas dasar kepentingan ini, sebenarnya kompeni lebih banyak menghambat penyebaran iman daripada mendorongnya. Pihak penguasa politis khawatir kalau-kalau kegiatan misi akan mempersulit hubungan komersial mereka. Karena itu diperlukan suatu strategi untuk menghindari hal buruk di atas. Salah satu strategi ini terjelma dalam bentuk peraturan. Sebuah contoh yang jelas dari peraturan ini adalah persoalan kepemilikan « *radicaal* », yaitu surat keterangan berwenang melakukan dinas sipil di Hindia. Campur tangan kuasa politis ini ternyata sempat memicu konflik antara Gereja dan Negara. Salah satu konflik yang muncul antara Negara dan Gereja berkisar pada politik netralitas yang dicanangkan pemerintah untuk menanggapi kebangkitan « fanatisme » Islam.⁴ Kendati fakta di atas, misi dan *zending* dipandang sebagai pendukung kolonialisme Belanda di Indonesia, khususnya sesudah tahun 1850.⁵ Di mata populasi terjajah, kegiatan penyebaran agama Kristen ini merupakan suatu kekuatan yang mengancam.

Memang ini merupakan salah satu faktor yang masih menghantui secara laten psikologi beberapa kalangan umat Islam. Dengan demikian, tidak mengherankan bila figur Gereja di Indonesia masih dikaitkan sebagai agama kolonialis Belanda. Hal ini cukup beralasan lebih-lebih bila kita membuka lembaran sejarah kolonialisme di mana beberapa kalangan Kristen pribumi telah diintegrasikan dalam sistem politis dan ekonomis yang dibangun pemerintahan Belanda. Adapun contoh lain, sehubungan dengan praktik diskriminatif pemerintah penjajah, yang bisa dikemukakan di sini adalah tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan bagi populasi pribumi yang beragama Kristen.⁶ Secara otomatis, model integrasi kolonialis

4 Jan Bank, *Katolik di Masa Revolusi Indonesia*, terj. dari bahasa Belanda [*Katholieken en de Indonesische Revolutie*, 1983] oleh Nicolette P. Ratih dan Tim Perwakilan KITLV, Jakarta: Grasindo, 1999, pp. 4.

5 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, p. 5.

6 Cf. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, buku I: *Akar-akar Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Kompas & Grasindo, 1995, p. 190.

semacam ini tidak memungkinkan orang-orang yang tidak terpelajar untuk merasa diperlakukan secara diskriminatif.

Sesudah kemerdekaan Indonesia, nasionalisme tetap merupakan tema penulisan sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Sebagai bangsa yang masih muda, Indonesia merasa perlu memperkokoh identitas dirinya sebagai *nation-state*. Maka, kita bisa jumpai publikasi buku-buku sejarah yang berkutat dengan persoalan Gereja Katolik dan nasionalisme. Beberapa publikasi bisa disebut di sini. Denys Lombard mencatat bahwa sesudah kemerdekaan, Gereja (Katolik dan Protestan) menjadi « pembendung yang efektif terhadap ateisme », ⁷ suatu yang selaras dengan cita-cita kohesi nasional berdasarkan prinsip agamis. Sementara itu, Muskens menampilkan Gereja Katolik sebagai « partner » dalam pembangunan bangsa. ⁸

Catatan kecil. Setelah uraian di atas, sekarang kita bisa mencoba memberikan suatu komentar pendek tentang sejarah Gereja Indonesia. Kita menangkap bahwa sejarah Gereja Indonesia ditulis dalam perspektif/visi nasionalis. Namun kita diperingatkan oleh Seignobos dan Langlois akan bahaya dari suatu historiografi yang, dengan pendasaran ilmiah dan positif, bermaksud membangun suatu kenangan kolektif nasional. Sejarah hendaknya tetap setia pada jalurnya, yakni menunjukkan apa yang benar. Oleh sebab itu, penulisan sejarah yang bernada patriotik secara berlebihan perlu selalu diwaspadai sebab historiografi semacam ini menghalangi kita melihat kebenaran historis secara holistik. « *On renonce aussi à employer l'histoire pour exalter le patriotisme ou le loyalisme comme en Allemagne; on sent ce qu'il y aurait d'illogique à tirer d'une même science des applications opposées suivant les pays ou les partis ; ce serait inviter chaque peuple à mutiler, sinon à altérer, l'histoire dans le sens de ses préférences. On comprend que la valeur de toute science consiste en ce qu'elle est vraie, et on ne demande plus à l'histoire que la vérité.* » ⁹

2. Solidaritas historis dalam teologi J.B. Metz

Iman Kristiani harus berbicara, juga pada masa kini, tentang sejarah kebebasan. Itulah yang menjadi keprihatinan J.B. Metz. Murid dari teolog Karl Rahner ini kemudian mencoba menyusun suatu program teologis yang bertujuan mengarahkan teologi kepada persoalan-persoalan dunia. Dengan “teologi politik”, dia memaksudkan suatu cara baru ber-« teologi praktis » dalam konteks masyarakat moderen.

7 Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jilid 2: *Jaringan Asia*, diterj. dari edisi bahasa Perancis [*Le Carrefour javanais. Essai d'histoire globale. II : Les réseaux asiatiques*, Paris : École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990], Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, p. 352.

8 Dr. M.P.M. Muskens, *Partner in National Building. The Catholic Church in Indonesia*, Aachen: Missio Aktuell Verlag, 1979.

9 Cf. J. Leduc, V. Marcos-Alvarez, J. Le Pellec, *Construire l'histoire*, 1998, p. 11.

Adapun, masyarakat moderen adalah masyarakat yang mewarisi tradisi filosofis Pencerahan dan revolusi Marxistis. Dalam konteks ini, emansipasi merupakan ciri penanda masyarakat moderen.

Refleksi J.B. Metz tetap relevan sejauh kapitalisme dimengerti sebagai « sejarah para pemenang » menurut prinsip-prinsip hukum alam à la Darwin. Saat ini dunia sedang gelisah menghadapi ancaman kolonialisme kultural dan ekonomis dimana kapitalisme secara global menjadi monster tanpa tandingan. Kredibilitas iman kristiani dipertaruhkan berhadapan dengan sistem kapitalistis yang membabibuta, dan yang hanya menjanjikan kemenangan hanya kepada mereka yang kuat dan berhasil.

Kredibilitas Iman Kristiani. Iman Kristiani tidak mengenal dua realitas terpisah, yaitu antara realitas yang manusiawi dan yang ilahi, oleh karena dogma Inkarnasi Kristus. Marcel Gauchet menegaskan bahwa « *De par leur union mystique en Christ, l'humain et le divin se disjoignent et se différencient définitivement, comme se défait en son principe l'intrication hiérarchique du séjour terrestre et du règne céleste* ». ¹⁰ Dengan dinamisme dogma Inkarnasi ini terjadilah suatu pembalikan yang memungkinkan orang untuk beralih dari logika superioritas Allah kepada logika keberlainan (*alterité*). Oleh sebab itu, dengan mengimani Yesus yang « menjadi daging », iman Kristiani melihat Allah yang menjadi jantung dunia, suatu keyakinan yang tidak akan sejalan dengan kerangka berpikir yang bercorak eskapisme (lari dari dunia) dan monoteisme yang kaku (kepatuhan total kepada yang ilahi).

Konsekuensi logisnya ialah bahwa iman Kristiani tidak dapat ditempatkan sebagai urusan “pribadi” belaka. Kata “pribadi” harus dimengerti dalam arti positif. Artinya, iman Kristiani adalah iman yang terbuka terhadap masalah dunia ini. Karena itu, tidak dapat dibayangkan adanya suatu teologi kristiani yang tertutup hanya pada dirinya sendiri, dan memutuskan hubungan antara agama dan masyarakat, antara eksistensi religius dan eksistensi sosial. Bila teologi terbuka terhadap dunia, dengan sendirinya teologi yang demikian memungkinkan iman kristiani « pantas dipercaya » (*credible*).

Kategori Kenangan dan Pengkisahan. Untuk mengembangkan suatu sintesis antara teori dan praksis, teologi politis menyodorkan kategori-kategori yang berpotensi untuk mengubah masyarakat dan sejarah. Tiga kategori dasar itu ialah kenangan, pengkisahan dan solidaritas. Pada bagian ini, kami akan menyajikan sekilas pandang gagasan J.B. Metz tentang kenangan dan pengkisahan.

Sebagai sebuah kategori dalam teologi politik, apa yang disebut sebagai ‘kenangan’ selalu mengacu kepada isi kenangan Kristiani (*Erinnerung*) yang di-ejawantahkan demi mewujudkan penebusan dan penggenapan manusia. Sebagai sebuah kategori yang dipertaruhkan dengan tujuan membuat iman Kristiani ini kredibel

10 Marcel Gauchet, *Le Désenchantement du monde*, Paris : Gallimard, 1985, p. 97.

dalam konteks masyarakat sekular, kenangan tidak pernah mengacu kepada suatu nostalgia atau romantisme, atau suatu operasi mental yang hanya sekedar membangkitkan pengalaman masa lampau dengan maksud berdamai dengan masa lampau tersebut. Metz menggunakan terminologi ‘kenangan’ yang berbahaya (*gefährliche Erinnerung*) oleh karena kenangan tersebut menggugat kondisi aktual dalam terang puncak penebusan Kristus. ‘Kenangan’ ini membangkitkan pengharapan yang terlena, membuka cakrawala masa mendatang dan mendorong praksis Gereja.¹¹ Kenangan akan penderitaan Yesus yang menderita, wafat dan dimakamkan, hadir kembali dalam *anamnesis* ekaristis.

Kategori kedua adalah *Erzählung*, pengkisahan. Jika Gereja merupakan suatu komunitas yang mengenang, Gereja adalah juga komunitas yang bercerita, bisa berkisah dan bisa merasakan. Gereja tidak bisa hanya berargumentasi. Berkisah berarti terlibat dalam sejarah penderitaan, sementara dalam berargumentasi, orang bertolak dari suatu persoalan, konsep-konsep abstrak, sistem. Kategori pengkisahan (dalam aksi) tidak puas dengan model teologi yang abstrak. “Allah Abraham, Ishak dan Yakub” adalah Allah yang terlibat, yang sepak terjangnya bisa dikisahkan dan dialami secara nyata oleh umat yang ditebus-Nya.

Solidaritas historis « ke belakang » sebagai ortopraksis. Bagi Metz, sifat dari solidaritas historis yang dapat membentuk dan mengubah sejarah dan masyarakat yaitu *mistik* dan *politis*. Solidaritas historis semacam ini berkarakter mistik karena solidaritas ini muncul/lahir dari kenangan akan kisah Yesus Kristus. Solidaritas juga merupakan suatu praksis, suatu komitmen dalam sejarah dan masyarakat. Komitmen yang menyejarah menjadi tanda kriteria dari otentisitas suatu aksi solider. Sebagai salah satu kategori yang berfungsi praksis, yaitu membentuk dan mengubah kesadaran sejarah dan masyarakat, solidaritas historis bersifat politis. Manusia yang solider adalah insan yang memiliki komitmen untuk tetap bertindak mengupayakan agar manusia tetap merupakan insan, subyek, pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh sebab itu, manusia solider yaitu dia yang mengakui martabat setiap manusia, bukan hanya dalam diskursus, melainkan juga dalam praksis.

Solidaritas *mistiko-politis* ini bersifat tanpa pamrih dan tidak dibangun di atas dasar kompetensi atau prinsip timbal-balik masuk akal. Aksi solider tidak terstruktur menurut kontrak kepentingan; jadi, di sini, orang memiliki risiko kehilangan. Karena itu, solidaritas ini memiliki dua arah: “ke depan” dan “ke belakang”. Setiap orang yang menempuh jalan solider, sebagai jalan “mengikuti Kristus”

11 « On pense ici au souvenir qui presse le présent et le met en cause, parce qu’il fait souvenir vers un avenir non encore éprouvé. Un tel souvenir fait éclater le joug de la conscience dominante. Il réclame des conflits encore inouïs, refoulés jusqu’à aujourd’hui, et des espérances hors de prix. Contre la mentalité dominante, il se fait le porte-parole d’expérience faites naguère, et il déracine ainsi les évidences du présent. » J.-B. METZ, *La foi dans l’histoire et dans la société*, terj. dari edisi bahasa Jerman [*Glaube in Geschichte und Gesellschaft*. Mainz : Matthias-Grünwald Verlag, 1977] oleh Paul Corset dan Jean-Louis Schlegel Paris : Cerf, 1979, pp. 225-226.

menunjukkan sikap solider bukan hanya kepada mereka yang menang, yang berjasa, yang mencatat sejarah, melainkan juga menampilkan sikap solider terhadap mereka semua yang telah mati, yakni para korban dari sejarah penderitaan manusia. Metz menegaskan bahwa tanpa kenangan akan dan solidaritas dengan manusia yang menderita dalam sejarah penderitaan manusia, solidaritas “ke depan,” kepada generasi mendatang, hanya akan menciptakan suatu sejarah eksklusif yang dimonopoli oleh mereka yang paling kuat, paling cerdas, paling pantas diingat menurut kriteria Darwinisme.¹² Mereka yang mau menghayati solidaritas historis yang terarah kepada para korban sistem ekonomi dan politik akan menolak prinsip determinis hukum alam semacam ini. Dengan kisah turunnya Kristus ke tempat penantian, mau ditandaskan dalam pengakuan iman Kristiani bahwa sejarah penebusan oleh Kristus itu bersifat khas. Kristus solider dengan mereka yang mati bungkam dalam sejarah para pemenang.

Solidaritas mistico-politis ini memiliki juga karakter universal, artinya tanpa kecenderungan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu, karena keterarahannya kepada mereka semua yang menjadi “kelinci percobaan” dalam laboratorium pembangunan suatu proyek kemajuan. Sejarah mencatat bahwa pembangunan masyarakat kerap kali “melahap” rakyat kecil sebagai korban yang biasanya lenyap dari penulisan sejarah. Gereja bisa dikatakan solider sejauh Gereja bisa memenuhi panggilannya untuk merakyat.¹³

Kesimpulan. Kiranya, untuk mendapatkan suatu ‘kebenaran historis’, sejarawan tidak boleh terperangkap dalam penulisan sejarah yang mengagungkan para pemenang. Solidaritas mistiko-politis tidak bermaksud mengulangi kecenderungan di mana, seperti kita bisa catat misalnya, sejarawan Marxis mengagungkan mitologi keberhasilan revolusi kaum proletar atau kaum nasionalis menyajikan kisah heroik triumfal dari perjuangan populasi tertindas melawan kekuatan kolonial. Kedua contoh model sejarah bercorak propaganda ini tidak mungkin memperlihatkan kegagalan kaum yang hendak mereka perjuangkan.

Solidaritas *mistiko-politis* mengajak menulis lembaran sejarah yang seimbang. Kebenaran sejarah tidak dapat direduksi pada mitos heroik pelaku-pelaku yang ditampilkan sebagai penakluk tangguh. Sejarah harus mengingat, menceritakan dan solider terhadap para korban yang tak bersuara. Kategori solidaritas dalam refleksi Metz membongkar pretensi-pretensi historis yang, dengan bersandar pada metodologi ilmiah-positif dan pada instrumen teknis (yang berkaitan dengan pilihan dokumen-dokumen), hendak merumuskan kompleksitas sejarah secara agak simplistik sebagaimana halnya dapat kita temukan dalam pandangan Ranke (“me-

12 “A son tour, l’histoire abstraite de la liberté n’est qu’une histoire des succès, une histoire des vainqueurs. L’histoire qui avait un sens de liberté est une catégorie réservée aux vainqueurs, aux gens arrivés: *vae victis!* Mais ce slogan n’est pas un principe qui donne sens à l’histoire de la liberté, c’est la définition exacte du darwinisme dans l’histoire de la nature. Ainsi, cette histoire abstraite de la liberté ne fait-elle en fin de compte rien d’autre que de copier l’histoire de la nature.” J.B. Metz, *Ibid.*, p. 152.

13 J.B. Metz, *Ibid.*, p. 259.

nunjukkan secara murni dan sederhana terjadi pengalaman masa lampau”, *wie es eigentlich gewesen*) atau Michelet (*“résurrection de la vie intégrale”*) atau R.G. Collingwood (*“re-enactment of the past”*).

3. Memahami hubungan resiprok antara nasionalisme dan solidaritas historis

Bagaimana seharusnya belajar dari sejarah? Bagaimana harus mengenang? Dengan mengikuti jalan yang sudah dirintis J.B. Metz, dapatlah kita sampaikan beberapa butir sumbangan pikiran sederhana dalam hubungannya dengan persoalan seputar nasionalisme dan solidaritas *mistiko-politis*.

Kemustahilan merekonstruksi sejarah Gereja pada zaman kolonisasi melalui dalam perspektif *nation-state*. Sejarah kolonisasi adalah sejarah penderitaan. Agar dapat mengerti sejarah penderitaan ini, metodologi yang mengabdikan perspektif nasionalistis dan patriotik sangat tidak memadai untuk melihat “yang benar” secara historis. Hanya mereka yang solider dapat menyajikan suatu sejarah mengenai Gereja Indonesia dalam masa kolonial (sejarah penderitaan) secara proporsional. Solidaritas historis merupakan sarana untuk terbuka dan menerima pengalaman masa lampau.

Menggunakan pendekatan sempit nasionalistis dan patriotik yang bertujuan mendukung kohesi dan nilai-nilai Indonesia akan membuat kita mengalami kesulitan berdamai dan menerima kebenaran masa lampau. Padahal penulisan sejarah sebagai fungsi sosial hendak membebaskan manusia dari prasangka tentang masa lampainya.¹⁴ Pendek kata, hendaknya nasionalisme dan patriotisme tidak memisahkan dan mengasingkan kita dari solidaritas dengan pihak « lawan » yang kalah. Dengan demikian, solidaritas ini sungguh-sungguh menyatukan kemanusiaan yang terpecah-belah oleh kolonialisme, peperangan dan eksploitasi.

Keterbatasan penulisan sejarah berdasarkan perspektif masa kini. Telah ditandaskan bahwa solidaritas historis yang bersifat mistik dan politik mengajak kita untuk mewujudkan solidaritas “ke depan”, artinya, solider dengan mereka yang akan datang. Penegasan ini mengindikasikan bahwa *saat sekarang* bukanlah saat yang tepat untuk *mengerti* secara final “kebenaran sejarah” dari Gereja pada masa kolonisasi. Kita perlu menaruh dalam tanda kurung apa yang dipandang sebagai ‘kepastian historis’ versi *saat sekarang*. Hal ini disebabkan karena *saat sekarang* masih diwarnai oleh krisis, trauma, pengkhianatan, kecurigaan, keterpurukan.

14 Pandangan yang diyakini disampaikan pertama kali oleh Goethe. Cf. Henri Irénée Marrou, “Le métier d’historien” dalam Charles Samaran (dir.), *L’Histoire et ses méthodes*, Paris : Gallimard, « Encyclopédie de la Pléiade », 1961, p. 1478

Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa dalam penulisan sejarah, khususnya sejarah Gereja (Katolik) Indonesia, kategori solidaritas historis yang dikemukakan oleh J.B. Metz bisa membantu kita untuk menemukan kebenaran sejarah tanpa memutlakkan pendekatan yang bersifat murni historis, atau bahkan jatuh dalam historisme, dalam arti negatif terminologi tersebut. Dengan bersikap solider, kita akan dibebaskan dari kecenderungan subyektif dalam menuliskan sejarah Gereja Indonesia dan dari kecenderungan untuk menulis sejarah secara anakronik. Karena itu, penekanan pada perspektif nasionalis dan kolonialis dalam penulisan sejarah Gereja tidak akan relevan lagi. Dengan kata lain, berpangkal pada solidaritas historis ini, kebenaran sejarah dapat sungguh-sungguh diterima, sebab penulisan sejarah tersebut terarah kepada penebusan manusia.

BIBLIOGRAFI

- Antoine Prost, *Douze leçons sur l'histoire*, Paris : Éditions du Seuil, « Points-Histoire », 1996.
- Charles Samaran (dir.), *L'Histoire et ses méthodes*, Paris : Gallimard, « Encyclopédie de la Pléiade », 1961.
- Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jilid 2: *Jaringan Asia*, diterj. dari edisi bahasa Perancis [*Le Carrefour javanais. Essai d'histoire globale. II : Les réseaux asiatiques*, Paris : École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990], Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (Eds.), *Panggung Sejarah. Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Jan Bank, *Katolik di Masa Revolusi Indonesia*, terj. dari bahasa Belanda [*Katholieken en de Indonesische Revolutie*, 1983] oleh Nicolette P. Ratih dan Tim Perwakilan KITLV, Jakarta: Grasindo, 1999.
- J.B. METZ, *La foi dans l'histoire et dans la société*, terj. dari edisi bahasa Jerman [*Glaube in Geschichte und Gesellschaft*. Mainz : Matthias-Grünwald Verlag, 1977] oleh Paul Corset dan Jean-Louis Schlegel Paris : Cerf, 1979.
- J. Leduc, V. Marcos-Alvarez, J. Le Pellec, *Construire l'histoire*, 1998.
- Marcel Gauchet, *Le Désenchantement du monde*, Paris : Gallimard, 1985.
- M.P.M. Muskens, *Partner in National Building. The Catholic Church in Indonesia*, Aachen : Missio Aktuell Verlag, 1979.
- Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, buku I: *Akar-akar Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Kompas & Grasindo, 1995.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.